

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Definisi Kemiskinan

Berdasarkan *World Bank Institute* (2005), kemiskinan merupakan kurangnya tingkat kesejahteraan di atas yang lainnya sehingga orang miskin dapat diartikan sebagai seseorang yang tidak memiliki pendapatan yang cukup atau tingkat konsumsi pada batas minimum yang memadai. Kemiskinan dapat dipandang berdasarkan nilai moneter, jenis konsumsi, hunian, atau kesehatan yang buruk. Pendekatan makro mengenai kemiskinan dan kesejahteraan terfokus pada kemampuan individu untuk menjalankan fungsinya dalam masyarakat, misalnya pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketidakberdayaan, dan kekurangan kebebasan dalam berpolitik. Menurut Vincen (2009), kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang melampaui masalah ekonomi karena berkaitan dengan sosial, politik, dan budaya. Kemiskinan merupakan wujud akibat dari reaksi konflik manusia karena kekurangan kebutuhan dasar, biologis, dan psikologis.

Menurut Badan Pusat Statistik (2012), seseorang dapat dikatakan sebagai individu miskin apabila memiliki pengeluaran rata-rata sebesar Rp 211.000,- per bulan per orang. Besaran ini diukur berdasarkan tingkat kebutuhan makanan dan non makanan. Garis kemiskinan Provinsi Jawa Timur sendiri berada pada angka Rp202.624,- per orang per bulan untuk kawasan perkotaan, dengan demikian masyarakat miskin adalah individu yang memiliki pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan tersebut.

2.1.2 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan berkaitan dengan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat berkaitan dengan penyebabnya. Menurut Nugroho (2002), berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, antara lain:

- a. Kemiskinan alami, yaitu kemiskinan yang disebabkan keterbatasan sumber daya sehingga menyebabkan produktifitas dan efisiensi yang rendah;

- b. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh dampak kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan dengan ditandai ketimpangan ekonomi dan sosial;
- c. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan sikap masyarakat dalam bergaya hidup, perilaku, dan budaya yang menjebak dalam kondisi kemiskinan.

2.1.3 Karakteristik Kemiskinan di Perkotaan

Karakteristik kemiskinan di perkotaan dapat dilihat berdasarkan tiga dimensi yang juga berperan sebagai indikator penyebab kemiskinan. Berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan oleh Bappenas (2004), tiga dimensi karakteristik kemiskinan yang dapat menjadi tolak ukur *benefit in kind* antara lain:

1. *Income*/Pemasukan

Pendapatan dipengaruhi oleh mata pencaharian masyarakat miskin yang memiliki kekurangan dalam hal keterampilan dan kemauan sehingga memiliki pekerjaan yang tidak tetap. Sebagian besar pendapatan bersumber dari pekerjaan di sektor informal, hal ini dikarenakan sektor formal tidak mampu menyerap tenaga kerja dengan keterampilan rendah. Pekerjaan lain yang dilakukan masyarakat miskin di perkotaan adalah pekerjaan beresiko tinggi dan tidak ada jaminan akan keberlanjutannya sehingga berdampak pada pendapatan yang rendah. Dampak yang diperoleh dari pendapatan yang rendah tersebut adalah permasalahan pada kepemilikan lahan dan pelayanan dasar dari sektor publik.

2. Pendidikan

Masyarakat miskin perkotaan memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung (Bappenas, 2004). Dampak dari permasalahan tersebut adalah penduduk miskin tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang relatif tetap, kurangnya kegiatan konstruktif khususnya untuk meningkatkan keterampilan anak muda usia sekolah, dan ketidaksetaraan gender yang berkelanjutan.

3. Kesehatan

Masyarakat miskin yang bekerja di sektor informal memiliki resiko pendapatan yang rendah. Hal tersebut menyebabkan ketidakmampuan menjangkau pelayanan dasar

seperti permukiman yang layak. Masyarakat miskin perkotaan yang didominasi oleh masyarakat yang melakukan urbanisasi tidak memiliki kesempatan penguasaan lahan yang layak sehingga tercipta kawasan kantong-kantong permukiman kumuh. Kondisi fisik permukiman dan keterbatasan pendapatan akan menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat untuk mengakses kesehatan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Suwandi (2004), penanggulangan kemiskinan perkotaan membutuhkan empat pilar strategi yang perlu diperhatikan, antara lain

- a. Perluasan kesempatan, yaitu menciptakan suasana dan lingkungan ekonomi makro, pemerintahan, dan pelayanan publik yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sehingga mampu meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. Pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemantapan organisasi dan kelembagaan sosial sehingga mampu mandiri dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin;
- c. Peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin baik individual maupun kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan, pendidikan, dan usaha agar mampu beradaptasi dengan lingkungan;
- d. Perlindungan sosial, yaitu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang rentan seperti pengemis, anak terlantar, korban konflik, dan yang terkena dampak krisis.

2.2 Pelayanan Infrastruktur

Utoro (2006) mengemukakan bahwa pelayanan merupakan perwujudan penyelenggaraan kepada masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan dan kepentingan kegiatan. Pelayanan publik merupakan kebutuhan primer yang meliputi tingkat pelayanan, pola persebaran, jangkauan pelayanan, dan kecendrungan tingkat kebutuhan. Sebagian besar infrastruktur dapat dikatakan sebagai fasilitas publik, yaitu fasilitas yang disediakan oleh pihak pemerintah atau dikelola swasta dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang umumnya berbentuk jalan, jembatan, gedung, ruang terbuka, dan sebagainya.

Kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi mencirikan perkembangan suatu kota di samping aktivitas lain yang ada. Salah satu indikasi dari dinamika perkembangan kota

dapat dilihat dari kondisi perekonomian kota tersebut (*urban economic*). Secara umum, ciri perkembangan kota dapat ditentukan oleh kapasitas prasarana dan sarana yang ada di kota itu. Kondisi tersebut mengindikasikan prasarana dan sarana menjadi bagian yang sangat vital dalam perkembangan suatu kota. Kapasitas prasarana dan sarana perkotaan ini secara umum dapat dilihat dari jenisnya, daya tampung atau daya dukung dan sistem pengelolaannya serta kesesuaiannya dengan kondisi kota atau daerah baik secara fisik, sosial dan ekonomi.

Infrastruktur menjadi dasar utama dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Dalam penerimaan ekonomi, infrastruktur terdiri dari fasilitas publik. Menurut Dardak (2008), pelayanan infrastruktur merupakan bagian dari sektor publik untuk memungkinkan konsumsi swasta dan rumah tangga. Dinamika perekonomian suatu kota ditentukan oleh seberapa jauh efisiensi penggunaan ruang atau pola penggunaan ruang untuk aktivitas penyediaan infrastruktur perekonomian di kota tersebut. Perkembangan perekonomian kota ini secara spesifik akan ditentukan oleh dinamika sistem perdagangan yang ada di kota itu dan juga di kawasan sekitarnya.

2.2.1 Aksesibilitas

Menurut SNI 1733 2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Permukiman di Perkotaan, aksesibilitas adalah kemudahan pencapaian yang disediakan bagi semua orang termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau mental, seperti penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, penderita penyakit tertentu dalam mewujudkan kesamaan kesempatan.

2.2.2 Tingkatan sarana

Berdasarkan standar SNI 03 1733 2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Permukiman di Perkotaan, tingkatan sarana merupakan hirarki yang menunjukkan status kelas berdasarkan jumlah penduduk yang dapat dilayani.

Tabel 2.1 Tingkatan Sarana Perkotaan

No	Jenis Sarana	Klasifikasi	Tingkatan	Jumlah Manusia yang dilayani	Radius Pelayanan (m)
1	Pendidikan	TK Sekolah Dasar	-	-	500
			A	480	1000
			B	360	1000
		SLTP	C	240	1000
			A	1080	1000
			B	720	1000
		SMU	C	360	1000
			A	1080	3000

No	Jenis Sarana	Klasifikasi	Tingkatan	Jumlah Manusia yang dilayani	Radius Pelayanan (m)
2	Kesehatan	Taman Bacaan Posyandu Klinik Bersalin Praktek Dokter Rumah Sakit	B	720	3000
			C	360	3000
			-	-	1000
			IV	1250	500
			II	30000	4000
3	Perdagangan	Toko Pertokoan Pusat Pertokoan/Pasar Lingkungan Pusat Perbelanjaan/Pasar Besar	III	5000	1500
			I	30000	1500
			I	250	300
			II	6000	2000
			III	30000	>2000
			IV	120000	>2000
			IV	2500	100
4	Ruang Terbuka	Taman dan lapangan olahraga Jalur Hijau Pemakaman Umum	II	120000	1000
			III	-	>1000
			III	120000	>1000
			III	120000	>1000

Sumber: SNI 03 1733 2004

2.2.3 Kapasitas Sarana

Berdasarkan standar SNI 03 1733 2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Permukiman di Perkotaan, kapasitas sarana adalah tingkatan daya tampung suatu sarana terhadap jumlah penduduk yang dapat menikmati pelayanan tersebut.

Tabel 2.2 Kapasitas Sarana Perkotaan

No	Jenis Sarana	Klasifikasi	Tingkatan	Jumlah Manusia yang dilayani
1	Pendidikan	TK Sekolah Dasar	-	-
			A	480
			B	360
		SLTP	C	240
			A	1080
			B	720
		SMU	C	360
			A	1080
			B	720
2	Kesehatan	Taman Bacaan Posyandu Klinik Bersalin Praktek Dokter Rumah Sakit	C	360
			-	-
			IV	1250
			II	30000
			III	5000
3	Perdagangan	Toko Pertokoan Pusat Pertokoan/Pasar Lingkungan Pusat Perbelanjaan/Pasar	I	30000
			I	250
			II	6000
			III	30000
			IV	120000
			IV	120000
			IV	120000

No	Jenis Sarana	Klasifikasi	Tingkatan	Jumlah Manusia yang dilayani
		Besar		
4	Ruang Terbuka	Taman Bermain	IV	2500
		Taman dan lapangan olahraga	II	120000
		Jalur Hijau	III	-
		Pemukaman Umum	III	120000

Sumber: SNI 03 1733 2004

2.2.4 Ketersediaan Trotoar/ Jalur Pedestrian

Menurut Priyanto (2004), jalur pedestrian merupakan wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Jalur pedestrian juga dapat memicu interaksi sosial antar masyarakat apabila berfungsi sebagai suatu ruang publik. Jalur pedestrian tidak bisa lepas dari karakteristik aktivitas atau fungsi guna lahan dan bangunan yang ada di sekitarnya serta faktor kelengkapan dan kondisi elemen-elemen pendukung.

Faktor-faktor pembentuk jalur pedestrian, antara lain (Priyanto, 2004):

- Faktor fisik, meliputi panjang, lebar, dan ketinggian dari jalur pedestrian tersebut;
- Aksesibilitas pedestrian;
- Pelaku atau pengguna;
- Frekuensi aktivitas yang terjadi;
- Hubungan dengan lingkungan sekitarnya, seperti kawasan permukiman, perkantoran, perdagangan, dan lainnya;
- Faktor psikis, meliputi keamanan dan kenyamanan.

Dalam dimensi perkotaan, jalur pedestrian merupakan ruang khusus bagi pejalan kaki yang berfungsi sebagai sarana pencapaian yang dapat melindungi dari bahaya. Jalur pedestrian di Indonesia dikenal sebagai trotoar. Namun jalur pedestrian memiliki kelemahan dalam melakukan perjalanan jarak jauh dan terpengaruh oleh kondisi alam (Priyanto, 2004).

2.2.5 Ketersediaan Parkir

Pelaku perjalanan yang menggunakan kendaraan pribadi pada suatu saat pasti membutuhkan tempat untuk berhenti sementara maupun berhenti lama (parkir), sehingga ketersediaan ruang parkir pada suatu tempat tujuan perjalanan merupakan salah satu fasilitas yang diharapkan oleh pengunjung tempat tersebut.

Menurut SNI 03 1733 2004, lokasi lahan parkir untuk pusat-pusat kegiatan dapat didesain baik dengan dikelompokkan ataupun menyebar di setiap pusat kegiatan tergantung pada perencanaan. Beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Lahan parkir merupakan fasilitas pelengkap dari pusat kegiatan, sehingga sedapatnya sedekat mungkin dengan pusat kegiatan yang dilayani;
- b. Lokasi parkir harus mudah diakses/dicapai dari/ke pusat-pusat kegiatan tanpa gangguan ataupun memotong arus lalu lintas jalan utama;
- c. Lahan parkir harus memiliki hubungan dengan jaringan sirkulasi pedestrian secara langsung; dan
- d. Lokasi parkir harus mudah terlihat dan dicapai dari jalan terdekat.

Adapun kebutuhan luas dari lahan parkir tergantung pada beberapa faktor:

- a. Jumlah pemilikan kendaraan;
- b. Jenis kegiatan dari pusat kegiatan yang dilayani; dan
- c. Sistem pengelolaan parkir, misalnya parkir bersama, parkir berbagi antar beberapa kapling (*shared parking area*), ataupun parkir lahan pribadi (*private parking area*).

2.2.6 Ketersediaan Ruang Terbuka

Menurut SNI 03 1733 2004, ruang terbuka merupakan bagian yang harus dimiliki dalam suatu sarana pelayanan publik. Luas ruang terbuka dalam sarana dapat dilihat dari selisih luas lahan keseluruhan dengan luas lahan terbangun.

Tabel 2.3 Kebutuhan Ruang Terbuka

No	Jenis Sarana	Klasifikasi	Luas Lantai Minimum (m ²)	Luas Lahan Minimum (m ²)
1	Pendidikan	TK	216	500
		Sekolah Dasar	633	2000
		SLTP	2282	9000
		SMU	3835	12500
		Taman Bacaan	72	150
2	Kesehatan	Posyandu	36	60
		Klinik Bersalin	1500	3000
		Praktek Dokter	18	-
		Rumah Sakit	1500	3000
3	Perdagangan	Toko	50	100
		Pertokoan	1200	3000
		Pusat Pertokoan/Pasar Lingkungan	13500	10000
		Pusat Perbelanjaan/Pasar Besar	36000	36000

Sumber: SNI 03 1733 2004

2.2.7 Penerangan

Menurut Iswanto (2006), elemen-elemen pendukung yang harus terdapat pada sarana umum antara lain:

- a. Lampu pejalan kaki
 - 1) Tinggi 4-6 meter;
 - 2) Jarak penempatan 10-15 meter;
 - 3) Mengakomodasi tempat menggantung;
- b. Lampu penerangan sarana
 - 1) Penerangan yang merata;
 - 2) Pemilihan jenis lampu berdasarkan efektifitas.

2.2.8 Keamanan

Menurut Lituhayu (2009), segi keamanan merupakan penunjang dari sisi ekonomi. Lokasi bekerja sektor informal yang menempati tepi jalan maupun badan jalan tanpa segi keamanan akan jauh dari kesan aman dan nyaman. Masyarakat pekerja informal dengan adanya keamanan yang tidak mencakup ketertiban akan mendukung faktor ekonomi sehingga kemungkinan mendapat konsumen yang lebih banyak .

2.2.9 Kunjungan

Kunjungan adalah tindakan perihal perbuatan, proses, hasil mengunjungi atau berkunjung dalam rangka dan tujuan tertentu. Lituhayu (2009) mengemukakan bahwa para pekerja di sektor informal sangat mengutamakan jumlah konsumen yang dapat ditarik sehingga memberikan pemasukan. Konsumen yang besar dapat diperoleh pada kawasan strategis tertentu yang memberikan daya tarik seperti trotoar dan bahu jalan pada kawasan perbelanjaan besar.

2.2.10 Intensitas kegiatan

Menurut Fimela (2012), intensitas kegiatan adalah ukuran intensitas suatu kegiatan pada suatu tempat yang diartikan sebagai jumlah diadakannya kegiatan dalam waktu tertentu. Pada beberapa kasus, pekerja sektor informal dan pengemis di perkotaan sangat menggantungkan pendapatan dari lama bekerja di suatu objek tertentu dengan intensitas rata-rata 11 jam setiap harinya dan dilakukan pada setiap hari, terutama hari bekerja.

2.3 *Benefit in Kind Masyarakat Miskin*

Menurut Suwandi (2004), masyarakat miskin di perkotaan maupun di pedesaan harus dapat memperoleh pelayanan dasar yang terdiri dari ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

1. Manfaat Ekonomi

Manfaat ekonomi adalah besaran manfaat yang diperoleh secara langsung dari pendapatan yang diterima setiap bulan oleh masyarakat sehingga dapat dijadikan tabungan atau investasi.

2. Manfaat Pendidikan

Dalam *economic benefit*, pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu manfaat tidak langsung yang diterima. Manfaat pendidikan adalah besaran rupiah yang disisihkan untuk kepentingan pendidikan seperti sekolah, kursus, pembelian peralatan, dan sebagainya.

3. Manfaat Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan dapat dijadikan sebagai salah satu manfaat tidak langsung yang diterima. Manfaat kesehatan adalah besaran rupiah yang disisihkan untuk kepentingan kesehatan seperti jaminan kesehatan, kepentingan berobat, dan sebagainya.

2.4 *Spatial Multiple Regression*

Salah satu hal yang diperoleh dari sistem informasi geografis adalah kemampuannya dalam menganalisis data spasial. Model analisis data spasial ini sering disebut sebagai analisis spasial. Tidak semua perangkat lunak menyediakan metode analisis spasial seperti yang dimaksudkan dalam sistem informasi geografis. Anselin (2004) menyebutkan bahwa analisis spasial mengarah pada banyak macam operasi dan konsep termasuk perhitungan sederhana, klasifikasi, penataan, tumpang susun geometris, dan pemodelan kartografis. Analisis spasial merupakan prosedur kuantitatif yang dilakukan pada analisis lokasi.

Salah satu perangkat lunak yang dapat membantu proses dan hasil analisis spasial adalah GeoDa. GeoDa adalah aplikasi interaktif yang dapat menggabungkan peta dengan grafik statistik yang dapat diaplikasikan dengan ilmu kesehatan masyarakat, pembangunan, ekonomi, analisis permukiman, dan kriminologi. Secara garis besar, fungsi GeoDa dapat diklasifikasikan ke dalam enam kategori:

- Manipulasi data spasial dan utilitas;
- Transformasi data melalui transformasi variabel dan variabel;
- Pemetaan dan animasi peta;
- Grafik Statistik;
- Autokorelasi spasial; dan
- Regresi spasial.

2.4.1 Model Regresi Spasial

Menurut Anselin (2004), model spasial melibatkan pengaruh spasial yang disebut dengan model regresi spasial. Salah satu pengaruh spasial yaitu autokorelasi spasial. Adanya unsur autokorelasi spasial menyebabkan terbentuknya parameter spasial autoregresif dan *moving average* sehingga proses spasial yang terjadi adalah sebagai berikut:

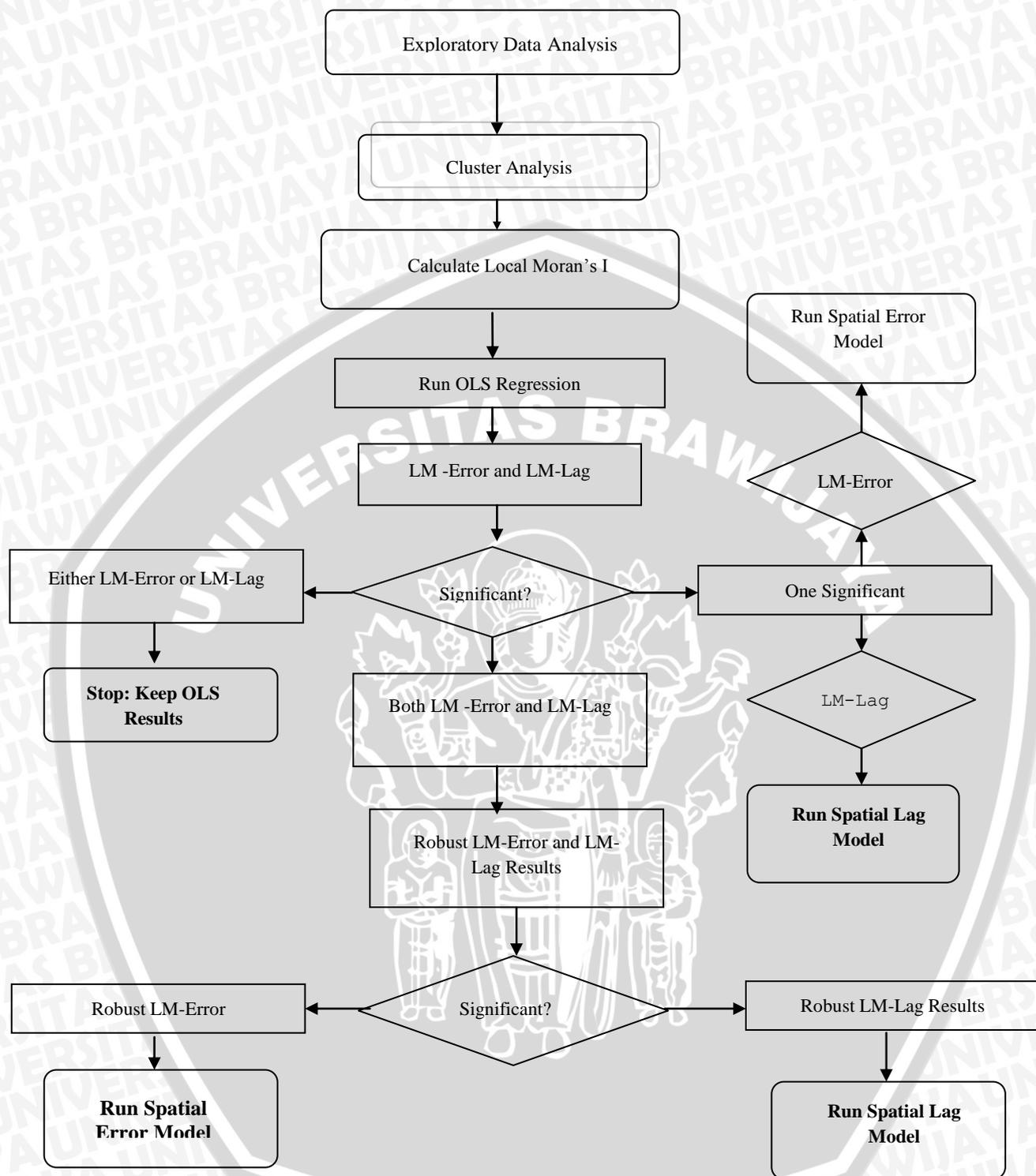
$$Y = pW1y + x \beta + \mu$$

dan

$$\mu_t = \lambda W2 \mu_{t-1} + E$$

Keterangan:

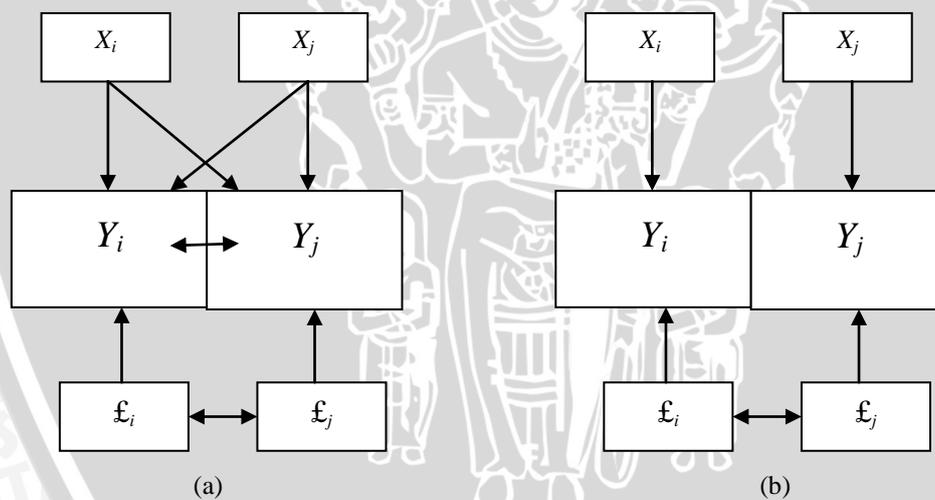
- Y : Vektor peubah dependen
 x : matriks berisi p peubah dependen
 β : Vektor koefisien parameter regresi
 p : koefisien autoregresif spasial *lag* dependen
 λ : koefisien autoregresif spasial *error* dependen
 μ : faktor *error* yang diasumsikan mengandung autokorelasi
 W : matriks bobot spasial peubah dependen
 N : Banyaknya pengamatan
 t : Banyaknya parameter regresi
 E : vektor *error* yang diasumsikan tidak mengalami autokorelasi



Gambar 2.1 Alur Analisis Spasial Regresi

Sumber : Anselin (2004)

Proses analisis *spatial regression* dimulai dengan melakukan uji model klasik, selanjutnya dilihat nilai signifikan antara nilai *LM Lag* dan *LM Error* yang menunjukkan nilai probabilitas di bawah 0,05 (derajat kesalahan). Apabila kedua nilai *LM Error* dan *LM Lag* tidak ada yang signifikan, maka nilai yang dilihat adalah nilai *Robust LM Error* dan *Robust LM Lag* untuk menentukan model terbaik yang digunakan. Persamaan dari model *LM-Lag* dan *LM- Error* adalah melibatkan keterkaitan antara tingkat kesalahan dalam perencanaan yang ada pada *polygon* yang diuji dengan *polygon* yang berdekatan (*neighboring*). Perbedaan mendasar pada model *Lag* dan *Error* adalah model *Spatial Lag* melibatkan keterkaitan antara variabel terikat pada *polygon* yang diuji dengan variabel terikat dan bebas pada *polygon* yang berdekatan. Model regresi *spatial lag* adalah model yang memperhatikan adanya dependensi variabel dependen pada suatu daerah dengan daerah lain yang berhubungan dengannya sedangkan model regresi *spatial error* adalah model yang memperhatikan dependensi nilai *error*nya.



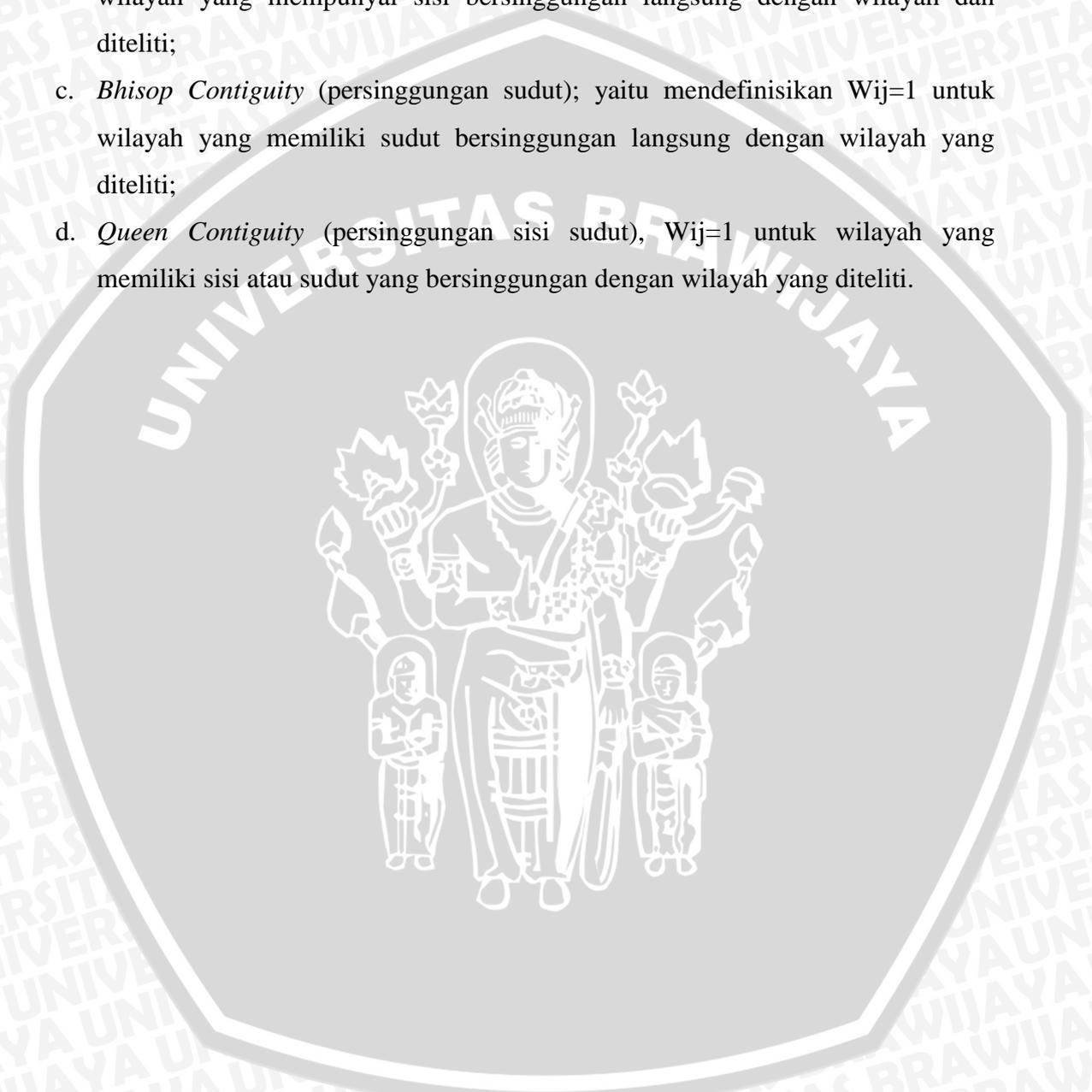
Gambar 2.2 Fungsi *Spatial Lag* (a) dan Fungsi *Spatial Error* (b)

Sumber : Anselin (2004)

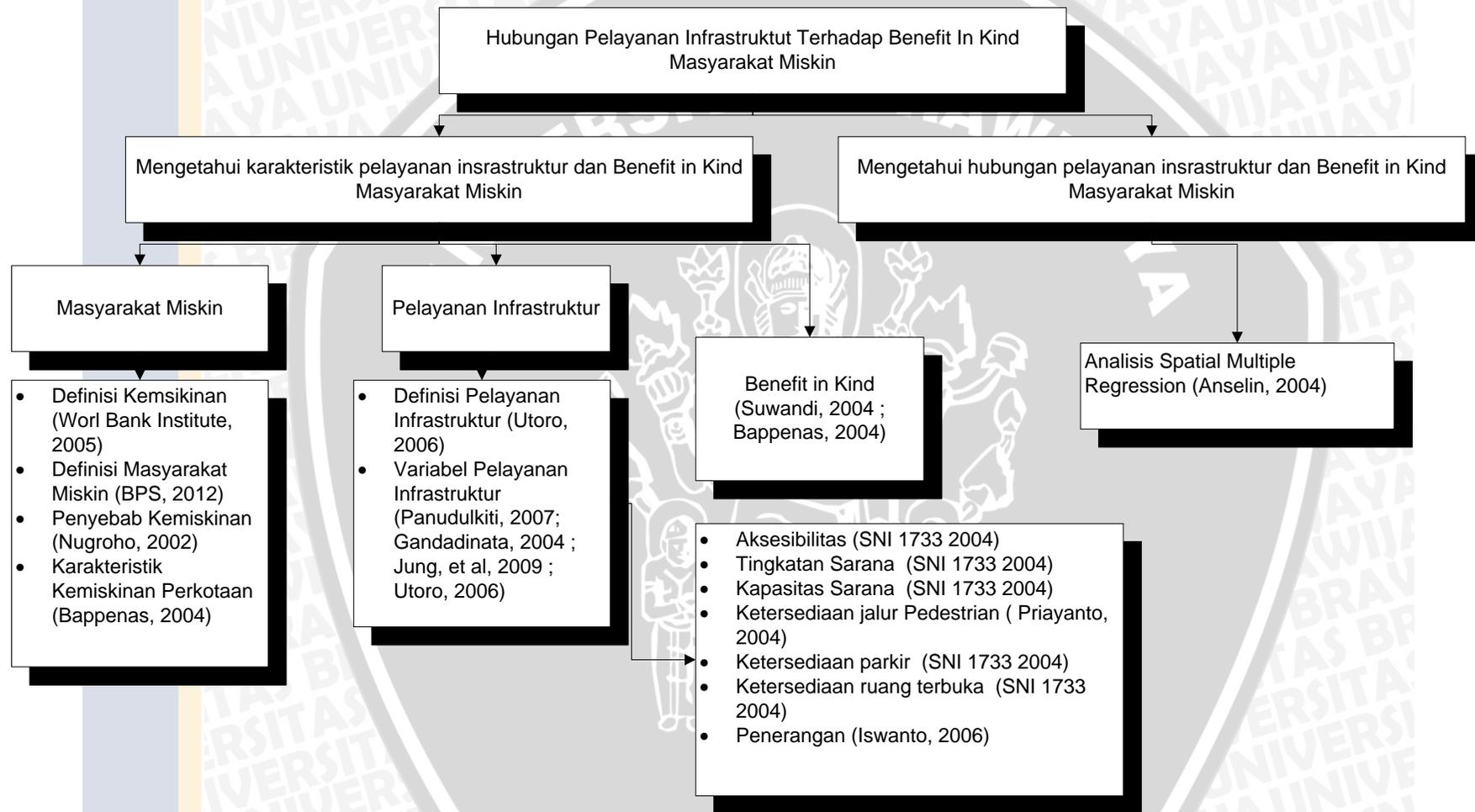
2.4.2 Bobot Spasial

Bobot spasial merupakan jumlah *polygon* yang menjadi tetangga terdekat bagi *polygon* yang diuji. Spasial matriks terbobot dapat diperoleh berdasarkan informasi jarak dari ketetanggaan (*neighborhood*) atau dalam kata lain jarak antar satu *region* dengan *region* lain. Terdapat beberapa alternatif yang dapat ditempuh untuk mendefinisikan hubungan persinggungan antar *region* tersebut. Menurut Anselin (2004), cara-cara tersebut antara lain:

- a. *Linier Contiguity* (persinggungan tepi), yaitu mendefinisikan $W_{ij} = 1$ untuk wilayah yang bersinggungan langsung baik di sisi kiri maupun kanan dengan wilayah yang diteliti;
- b. *Rook Contiguity* (persinggungan sisi), yaitu mendefinisikan $W_{ij} = 1$ untuk wilayah yang mempunyai sisi bersinggungan langsung dengan wilayah dan diteliti;
- c. *Bhisop Contiguity* (persinggungan sudut); yaitu mendefinisikan $W_{ij} = 1$ untuk wilayah yang memiliki sudut bersinggungan langsung dengan wilayah yang diteliti;
- d. *Queen Contiguity* (persinggungan sisi sudut), $W_{ij} = 1$ untuk wilayah yang memiliki sisi atau sudut yang bersinggungan dengan wilayah yang diteliti.



2.5 Kerangka Teori



Gambar 2.3 Kerangka Teori

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Sumber/Judul	Tujuan	Variabel	Metode Analisis	Output	Hasil yang diadopsi Penulis
1	Panudulkitti, P. 2007. <i>How Does the Level of Urbanization Matter for Poverty Reduction?</i>	Menganalisis dampak tingkat level urbanisasi pada pengurangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Education Expenditure Share</i> • <i>Health Expenditure Share</i> • <i>Primary School Net</i> • <i>Road Density</i> • <i>Population Density</i> • <i>Agriculture Value</i> • <i>GDP per Capita</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode teoritis • Metode statistik dengan GMM dan Index FGT 	Tingkat optimal urbanisasi dengan tingkat yang kuat dan signifikan secara statistik mempromosikan pengurangan kemiskinan.	Mengadopsi beberapa variabel untuk dijadikan variabel penelitian serta menyempurnakan kekurangan penelitian untuk mengidentifikasi perbedaan pengurangan kemiskinan antar daerah (<i>polygon</i>)
2	Jung, S et al. 2009. <i>Public Expenditure and Poverty Reduction in Southern United States</i> . Presented at the Southern Agriculture Economics Association Annual Meeting, Atlanta January 31-February 3	Menganalisa pengaruh dari pendidikan, kesehatan dan rumah sakit, taman dan rekreasi, dan pengeluaran kesejahteraan masyarakat pada pengentasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Individual Poverty rate</i> • <i>Demographic Variables</i> • <i>Economic and Structural variables</i> • <i>Eduaction</i> • <i>Helath</i> • <i>Parks and recreation</i> • <i>Public Welfare</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis <i>geographically weighted regression (GWR)</i> • Analisis <i>Local Indicators Spatial Association (LISA)</i> 	Pengeluaran pemerintah di taman dan rekreasi telah menjadi upaya pemerintah yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan serta terbentuk efek marginal dari pembentukan cluster.	Mengadopsi variabel untuk dijadikan variabel penelitian serta pendekatan analisis yang digunakan

Sumber: Studi Literatur (2012)

Berdasarkan penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Panudulkitti, P. 2007. *How Does the Level of Urbanization Matter for Poverty Reduction?*

Hal-hal yang diadaptasi dari penelitian tersebut adalah beberapa variabel yang menjadi masukan dalam penelitian, antara lain:

- a. *Education Expenditure Share* yang berlaku sebagai variabel manfaat pendidikan;
- b. *Health Expenditure Share* yang berlaku sebagai variabel manfaat kesehatan
- c. *Road Density* yang diasumsikan sebagai karakteristik jalur pejalan kaki.

Hal-hal yang diambil dari penelitian di atas adalah konsep variabel yang mendasari pengurangan kemiskinan yang diinterpretasikan kembali sebagai manfaat yang diterima oleh masyarakat miskin

2. Jung, S et al. 2009. *Public Expenditure and Poverty Reduction in Southern United States*. Presented at the Southern Agriculture Economics Association Annual Meeting, Atlanta January 31-February 3

Hal-hal yang diadaptasi dari penelitian tersebut adalah variabel yang menjadi masukan dalam penelitian adalah variabel *Parks and recreation* yakni dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pelayanan infrastruktur pada sarana ruang terbuka publik. Hal yang diadaptasi dari penelitian ini adalah konsep variabel yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam materi infrastruktur yang dikaji. Dalam penelitian tersebut tujuan utama adalah mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sarana publik terhadap pengentasan kemiskinan. Sedangkan penelitian Hubungan Pelayanan Infrastruktur terhadap *Benefit in Kind* Masyarakat Miskin adalah mengukur pelayanan yang tidak hanya dikeluarkan pemerintah terhadap manfaat bagi masyarakat miskin.